ANALISIS ETIKA PEJABAT BIROKRASI INDONESIA

Arie Budiawan¹, Sahadi², Neti Sunarti³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: ariebu@gmail.com

ABSTRAK

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe eksplanatif, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan menerangkan hubungan atau relasi kausal antar fenomena dengan menitik beratkan kepada etika birokrasi sebagai penentu keberhasilan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik. Yang mana bahwa etika birokrasi pada hakekatnya sangat terkait dengan tingkah laku para aparat birokrasi itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Upaya penerapan etika administrasi pemerintahan yang baik, perlu adanya aturan-aturan yang dibuat untuk mengatur para birokrat untuk tetap konsisten menjalankan dan mengamalkan etika yang baik dalam administrasi pemerintah. Reinventing Government adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau institusional); dan sikap perilaku birokrat (aspek perilaku) guna meningkatkan efektivitas organisasi. Merancang reformasi birokrasi tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi, tetapi mengubah pola pikir (mind set) dan pola budaya (cultural set) birokrasi untuk berbagi peran dengan peran aktor non negara dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu strategi reinventing government dimplikasikan di dalam birokrasi pemerintah melalui pendekatan integral yakni menggabungkan pendekatan struktural dan kultural. Melalui fakta-fakta yang ada, saat ini masih banyak instansi-instansi pemerintah yang belum mampu menerapkan prinsip etika administrasi yang baik, sekali lagi hal ini tertumpu pada kemauan individu-individu yang berkerja dalam instansi tersebut untuk dapat merubah kebiasaan yang buruk dan mengantinya dengan penerapan etika administrasi yang baik.

Kata Kunci: *Etika Pejabat Publik, Birokrasi Indonesia.*

ABSTRACT

The method in this research is using the explanatory type, using qualitative analysis techniques, namely by explaining the causal relationship between phenomena with an emphasis on bureaucratic ethics as a determinant of the success of bureaucratic reform in government administration, development and public services. Which is that bureaucratic ethics is essentially closely related to the behavior of the bureaucratic apparatus themselves in carrying out their duties and functions. Efforts to apply good government administration ethics, it is necessary to have rules made to regulate bureaucrats to remain consistent in carrying out and practicing

good ethics in government administration. Reinventing Government is a conscious and planned effort to change bureaucratic structures and procedures (reorganizational or institutional aspects); and behavior of bureaucrats (behavioral aspects) in order to increase organizational effectiveness. Designing bureaucratic reform is not just simplifying the bureaucratic structure, but changing the mindset (mind set) and cultural pattern (cultural set) of the bureaucracy to share roles with the role of non-state actors in good governance. Therefore, the reinventing government strategy is implemented in the government bureaucracy through an integral approach that combines structural and cultural approaches. Through the facts, currently there are still many government agencies that have not been able to apply the principles of good administrative ethics, once again this is dependent on the willingness of individuals who work in these agencies to be able to change bad habits and replace them with the application of good administrative ethics.

Keywords: *Ethics of Public Officials, Indonesian Bureaucracy.*

PENDAHULUAN

Birokrasi pemerintah sejatinya merupakan mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga reformasi birokrasi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik secara prima. Namun, di Indonesia masih terdapat permasalahan yang menyebabkan reformasi birokrasi belum optimal, seperti pola pikir birokrasi, budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) serta komitmen dari pemimpin. Dengan demikian disadari atau tidak bahwa birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kalau kita membandingkan dengan Negara-negara yang mana birokrasi pemerintahannya telah

berjalan dengan baik disertai adanya indikasi rasa kepuasan dari masyarakatnya dalam menerima pelayanan dari pemerintahannya, ada beberapa hal yang bisa menjadi tolak ukur kita dalam mencapai *good governance* tersebut, diantaranya dengan *the right man on the right place*, adanya analisis jabatan dalam penempatan seseorang dalam suatu jabatan. Kesesuaian jabatan dengan kemampuan aparatur tersebut akan memudahkannya dalam menerjemahkan isi kebijakan yang telah dibuat dan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan atasannya demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan jangan sampai terjadi pemerintah hanya bisa membuat peraturan saja namun tidak bisa melaksanakannya dengan baik.

Memang tidak dipungkiri pemerintah saat ini, sudah banyak melakukan terobosan yang sudah dilakukan diantaranya yaitu

penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas (ZI) yang konsisten di instansi pusat dan daerah mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, kontekstualisasi dan penyempurnaan peta jalan (*road map*) Reformasi Birokrasi Nasional, penguatan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Daerah, penguatan program evaluasi bersama pelaksanaan reformasi birokrasi serta adanya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR). Hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa pemerintah sangat konsen dan serius untuk membenahi birokrasi pemerintahan. Akan tetapi dalam kehidupan bernegara, birokrasi menjadi aktor yang sangat berperan dan dominan dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam praktek pemerintahan Negara peran birokrasi seringkali diragukan untuk dapat menghidupkan dan mendinamisasikan proses demokratisasi saat ini. Banyak masyarakat yang menilai dan menyatakan bahwa Birokrasi Indonesia adalah institusi yang lebih banyak menghabiskan ketimbang menghasilkan. Sebagai sarang korupsi dan pencurian, birokrasi adalah penyumbang terbesar finansial Negara. Benar-benar sebuah ironi kalau Negara menderita krisis akan tetapi para

pengelolanya bisa hidup kaya dan mewah.

Salah satu penyebab runtuhnya legitimasi birokrasi dimata rakyat adalah karena birokrasi tidak dijalankan secara rasional, dimana birokrasi mengabaikan sikap impersonalitas dalam pelaksanaan tugas. Fenomena tindakan-tindakan penyelewengan perilaku birokrasi dalam paradigma etika dapat dijumpai dimana-mana, penyebabnya mungkin karena birokrasi tidak dapat menempatkan diri sebagai institusi yang memperjuangkan kepentingan publik. Pokok permasalahan yang sering terjadi di birokrasi pemerintahan yaitu masih ada oknum pegawai yang menyalahgunakan kewenangan buat kepentingan pribadi. Seperti KKN, pemalsuan dokumen, sentralistik, pelayanan lambat dan berbelit-belit, birokrasi panjang, pungutan liar bahkan suap, sehingga muncul adagium negative “kalau bisa di persulit kenapa harus dipermudah”.

Persoalannya yang terjadi pada perilaku birokrasi saat ini, hampir semua tindakan-tindakan penyelewengan bermuara pada tidak dijalankannya prinsip-prinsip etika dalam administrasi pemerintahan yang sudah dirumuskan guna diterapkan dalam kehidupan kenegaraan dan lingkup administrasi yang sesungguhnya. Kemanfatan konsepsi etika tersebut hanya akan terasa apabila ia benar-benar dapat menjadi bagian dari dinamika administrasi modern. Dalam banyak hal, konsep dan teori filosofis mengenai moralitas dalam

bidang administrasi negara itu juga berasal dari praktek administrasi sehari-hari.

Oleh sebab itu, pembahasan mengenai etika administrasi negara tidak berada dalam ruang hampa, ia harus selalu menyertakan pembahasan tentang aplikasinya, bagaimana para birokrat dan administrator bertindak atau harus bertindak menurut kaidah-kaidah etis yang ada guna mencapai *good governance*.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang ingin diketahui adalah :

1. Bagaimana penerapan konsep etika administrasi dalam pejabat pemegang birokrasi ?
2. Apa azas-azas birokrasi yang baik untuk mencapai *good governance* ?
3. Bagaimana implementasi etika dalam praktek?

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan konsep etika dalam administrasi
2. Mengetahui asas-asas birokrasi yang baik

Mengetahui implementasi etika dalam praktek

KAJIAN PUSTAKA

Secara etimologis “etika” berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan, adat. Jadi etimologi kata “etika” sama dengan etimologi kata “moral” yang berarti adat kebiasaan. Walaupun bahasa asalnya berbeda; “etika” dari bahasa Yunani, sedang “moral” dari bahasa latin yaitu

mor atau mores (Bertens, 2004:4) dalam Sadhana Kridawati, 2010:2.

Sedangkan menurut Sadhana Kridawati, 2010:3 menyatakan bahwa etika berkaitan dengan proses yang menjelaskan apa yang benar dan yang salah dan menuntun kita bertindak berdasarkan apa yang kita anggap benar. Etika juga berkaitan dengan penggunaan nalar dalam menentukan suatu standar moral. Moral berkaitan dengan praktek-praktek dan kegiatan-kegiatan yang dianggap benar atau salah. Moral juga berkaitan dengan nilai-nilai yang dicerminkan oleh praktek-praktek tersebut dan aturan-aturan yang menentukan pelaksanaan praktek-praktek tersebut dalam situasi tertentu.

Moral suatu masyarakat, sebuah system politik atau organisasi publik berkaitan dengan apa yang dianggap benar atau salah dalam kelompok itu. Moral menyatakan nilai-nilai tertentu yang dianggap penting oleh anggota-anggota kelompok tersebut dan dicerminkan di dalam hukum, peraturan, kebijakan atau prosedur. Tindakan moral yaitu tindakan yang konsisten dengan moral kelompok, yang menyatakan komitmen yang paling mendasar dari kelompok itu tentang apa yang benar dan yang sah.

Selanjutnya menurut Bertens dalam Sadhana Kridawati, 2010:4 berkesimpulan bahwa ada tiga etika yang penting, yaitu (1) etika sebagai nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam

mengatur tingkah lakunya, atau disebut dengan “system nilai”; (2) etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan “kode etik”; dan (3) sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang acapkali disebut “filsafat moral”.

Sedangkan menurut Solomon dalam Kumurotomo, (2001:6) menyatakan bahwa etika merujuk kepada dua hal yaitu :

1. Etika berkaitan dengan disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta kebenarannya dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang dari filsafat.
2. Etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai yang hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

Pendekatan Etika Dalam Administrasi Publik

Menurut Sadhana Kridawati, 2010:8 menyatakan ada 2 pendekatan yang secara umum digunakan dalam etika administrasi yaitu *Utilitarianism* dan *Deontology*. Pendekatan Utilitarianism sebenarnya merupakan salah satu kategori pendekatan dalam kelompok pendekatan teleologis, disamping pendekatan *ethical egoism*.

1. Pendekatan teleologi terhadap etika administrasi berpangkal tolak bahwa apa yang baik dan buruk atau apa yang seharusnya dilakukan oleh administrasi. Acuan utamanya adalah nilai kemanfaatan yang akan diperoleh atau dihasilkan, yakni baik atau buruk dilihat dari konsekuensi keputusan atau tindakan yang

diambil. Dalam konteks administrasi publik pendekatan teleologis mengenai baik dan buruk itu, diukur antara lain dari pencapaian sasaran kebijakan-kebijakan publik (seperti pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan, kesempatan mengikuti pendidikan, kualitas lingkungan, pemenuhan pilihan-pilihan masyarakat atau perwujudan kekuasaan organisasi, bahkan kekuasaan perorangan kalau itu menjadi tujuan dari administrasi.

2. *Utilitarianism*, yang pangkal tolaknya adalah prinsip kefaedahan (*utility*), yaitu mengupayakan yang terbaik untuk sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini sudah berakar sejak lama, terutama pada pandangan-pandangan abad ke-19, antara lain dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mills.

Yang amat pokok dalam pandangan ini bukan memperhatikan nilai-nilai moral, tetapi konsekuensi dalam keputusan dan tindakan administrasi itu bagi masyarakat. kepentingan umum (*public interest*) merupakan ukuran penting menurut pendekatan ini. Di sini pun ditemui pula berbagai masalah.

1. Siapa yang menentukan apakah sesuatu sasaran, ukuran, atau hasil yang dikehendaki didasarkan pada kepentingan umum, dan bukan kepentingan si pengambil keputusan sendiri, atau kelompoknya, atau kelompok yang ingin diuntungkan.
2. Dimana letak batas antara hak perorangan dengan kepentingan umum. Jika kepentingan umum mencerminkan dengan mudah kepentingan banyak individu, maka masalahnya sederhana. Namun, jika ada perbedaan tajam antara

keduanya, maka akan timbul masalah.

3. Bagaimana membuat perhitungan yang tepat bahwa langkah-langkah yang dilakukan akan menguntungkan kepentingan umum dan tidak merugikan. Hal ini penting oleh karena kekuatan dari pendekatan (*utilitarianism*) ini adalah bahwa dalam neracanya harus diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan kerugian yang sekecil-kecilnya, untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Birokrasi Pemerintah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa birokrasi adalah system pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jabatan; cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban dengan berdasar pada aturan yang ketat. Pejabat yang bertindak secara birokrasi disebut birokrat. Birokratisasi diartikan sebagai system pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang tidak dipilih oleh rakyat. Disini dapat disimpulkan bahwa birokrat atau pegawai pemerintah didasarkan atas pengangkatan atau penunjukan (*appointed*) bukan dipilih (*elected*).

Birokrasi pemerintah menurut Almond dan Powel sebagaimana dikutip oleh Santoso (1997:19) dalam Sadhana Kridawati, 2010:85-86 menyatakan sebagai berikut : *The Governmental bureaucracy is a group of formally organized offices and duties, linked in a complex grading subordinates to the formal role-makers*

(Birokrasi Pemerintah adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal). Selanjutnya dijelsakan bahwa berdasarkan tugas pokok atau misi suatu organisasi birokrat dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu :

- a. Birokrasi pemerintah umum yaitu yang menjalankan tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dan lebih bersifat mengatur (*regulative function*).
- b. Birokrasi pembangunan yaitu yang menjalankan salah satu tugas khusus untuk mencapai tujuan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan yang disebut *development function* atau *adaptif function*.
- c. Birokrasi pelayanan yaitu unit organisasi pemerintahan yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat, yang disebut *public service*.

Sedangkan menurut Max Weber dalam Sadhana Kridawati 2010:90 menyatakan karakteristik pokok struktur birokrasi tipe-idealnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya pembagian kerja untuk masing-masing pegawai (*division of labour*) yang telah ditetapkan secara jelas dan dilaksanakan oleh masing-masing pegawai yang benar-benar memiliki keahlian khusus (*specialized experts*) dan bertanggungjawab bagi tercapainya tujuan organisasi secara efektif.

2. Adanya prinsip hierarki dalam organisasi (*the principle of hierarchy*), dimana struktur organisasi yang ada di bawah berada dalam control dan pengendalian struktur organisasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu setiap pejabat dalam hirerarki bertanggungjawab terhadap atasan masing-masing atas keputusan bawahannya dan juga atas tindakan-tindakannya sendiri. Walaupun masing-masing orang yang berada pada jenjang organisasi mempunyai otoritas-birokratis tetapi penggunaan otoritas itu tetap harus relevan dengan tugas-tugas resmi organisasi.
3. Pelaksanaan tugas diatur oleh system peraturan yang terus menerus diberlakukan secara konsisten (*system of rules*). System ini dimaksudkan untuk mempertahankan uniformitas yang terdapat dalam kinerja setiap tugas dan rasa tanggungjawab masing-masing anggota organisasi bagi pelaksanaan tugasnya.
4. Pejabat yang ideal adalah pejabat yang bekerja atas semangat "*formalistic impersonality*" atau sine ira et studio" yaitu bekerja atas dasar ketidakberfihakan kepada siapapun. Hubungan pejabat dank lien bersifat tidak pribadi agar pekerjaan dapat terlaksana secara efisien. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang adil bagi semua orang dan persamaan pelayanan administrasi.
5. Adanya system karier (*carier system*) dalam pekerjaan, ini berarti bahwa penerimaan pegawai didasarkan pada hasil seleksi (kualifikasi professional) dan promosi didasarkan atas senioritas atau prestasi atau menurut keduanya dan

sesuai dengan hasil penilaian atasannya. System ini mendorong tubuhnya loyalitas terhadap organisasi dan semangat kerja (*esprit de corps*) diantara anggota-anggotanya.

Fungsi Birokrasi

Dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, fungsi pemerintah adalah melayani, mengatur dan memberdayakan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah :

- 1) Pengaturan yang meliputi perumusan kebijakan umum, perumusan kebijakan pelaksanaan serta kebijaksanaan teknis sesuai dengan kebijakan umum.
- 2) Pelayanan dan perijinan yang terbagi menjadi :
 - a. Pelayanan Publik (*publik service*)
 - b. Penyelenggara fasilitas public (*public facility*)
 - c. Pengembangan ekonomi dan usaha daerah.
- 3) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan
- 4) Penyediaan dan penyebarluasan informasi
- 5) Pengelolaan atas kekayaan milik Negara yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan untuk pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6) Pengembangan sumber daya manusia sesuai bidang tugas pokoknya. Sadhana Kridawati 2010:112-113.

Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik

Salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan public di Indonesia adalah masalah moralitas. Etika merupakan konsep yang mampu menjabarkan apa yang terdapat didalam moral, menjelaskan apa yang benar dan apa

yang salah (*code of conduct*). Sehingga etika merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan menjadi ukuran kepuasan publik yang dilayani sekaligus ukuran keberhasilan organisasi pelayanan publik itu. Pelayanan publik tidak sekedar penyediaan atau pemberian barang atau jasa oleh pemerintah, tetapi juga berkenaan dengan nilai pemberian pelayanan itu sendiri maupun mengenai cara terbaik pemberian pelayanan publik itu sendiri.

Dalam pelayanan publik di Indonesia, pelanggaran moral dan etika dapat diamati mulai dari proses kebijakan publik (pengusulan program, proyek, dan kegiatan yang tidak didasarkan atas kenyataan), desain organisasi pelayanan public (pengaturan struktur, formalisasi, diskresi otoritas) yang sangat bias terhadap kepentingan tertentu, proses manajemen pelayanan publik yang penuh rekayasa (mulai dari perencanaan teknis, pengelolaan keuangan, SDM, informasi, dan sebagainya). Hal ini berdampak pada melemahnya system pemerintahan indonesia. Bagi Indonesia, pembenahan moralitas yang terjadi selama ini belum menyentuh substansi pembenahan moral.

Karena itu, salah satu aspek yang penting diperhatikan dalam proses reformasi administrasi publik adalah aspek etika dalam pelayanan publik. Bila aparatur pemerintah memahami dan menerapkan etika dalam memberikan pelayanan secara benar maka kinerja pelayanan akan meningkat dan memenuhi keinginan masyarakat.

Sebaliknya, apabila etika tersebut tidak dipahami dan dilaksanakan secara benar maka kinerja pelayanan menjadi buruk dan menimbulkan protes dari masyarakat. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat belum berakar pada norma-norma etika yang benar.

Perilaku tidak etis di dalam Birokrasi bisa terjadi karena alasan berikut :

- Kecenderungan mengedepankan etika personal ketimbang etika yang lebih besar (sosial).
- Kecenderungan mengedepankan kepentingan diri sendiri
- Tekanan dari luar untuk berbuat tidak etis.

Good Governance

Menurut Sadhana Kridawati, 2010:269 *good governance* hanya dapat diwujudkan apabila terjadi keseimbangan dari unsur yang ada dalam governance yaitu state (Negara atau pemerintah), private sector (sector swasta atau dunia usaha) dan society (masyarakat) saling berinteraksi dan memainkan peranannya masing-masing. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa yang menggerakkan kearah *good governance* itu tetap pemerintah karena fungsi pengaturan yang memfasilitasi unsur swasta dan masyarakat serta fungsi administrasi penyelenggaraan pemerintahan melekat pada unsur ini.

Peran pemerintah dalam *governance* :

- a. Dalam kolaborasi Negara/pemerintah sebagai figure kunci namun tidak mendominasi yang memiliki kapasitas mengkoordinasi (bukan memobilisasi).
- b. Kekuasaan pemerintah ditransformasikan dari yang semula dipahami “kekuasaan atas” menjadi “kekuasaan untuk” menyelenggarakan kepentingan, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah publik.
- c. Posisi Negara, NGO, swasta dan masyarakat local saling menyeimbangkan untuk tidak menyebut setara.
- d. Mendesain ulang struktur dan kultur organisasi agar siap menjadi katalisator.
- e. Negara harus melibatkan semua pilar masyarakat dalam proses kebijakan.
- f. Negara harus mampu meningkatkan kualitas responsivitas, adaptasi, akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kepentingan, pemenuhan kebutuhan, dan penyelesaian masalah public.

Dalam Sadhana Kridawati 2010:272 *good governance* berorientasi pada dua hal, yaitu :

Orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dan elemen-elemen konstituennya seperti : *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih secara demokratis dan mendapat kepercayaan rakyatnya), *accountability* (bagaimana kewajiban-kewajiban

dipertanggungjawabkan dan apakah tugas-tugas dan wewenang para pejabat diuraikan secara jelas), *securing of human rights* (seberapa jauh perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia), *autonomy and devolution of power*, (adanya otonomi dan devolusi kekuasaan kepada daerah) serta *assurance of civilian control* (adanya jaminan berjalannya mekanisme kontrol oleh masyarakat).

Pemerintah yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Hal ini tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauhmana struktur dan mekanisme politik serta administrasi berfungsi secara efektif dan efisien.

Selanjutnya menurut Tjokroamidjodo (2001:75) dalam Sadhana Kridawati 2010:277 mengemukakan 5 prinsip utama *good governance* sebagai berikut :

1. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

2. Transparansi (*transparency*)

Transparansi yaitu dapat diketahuinya oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijaksanaan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha.

3. Keterbukaan (*openness*)

Pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk open free suggestion, dan terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai merupakan partisipasi untuk perbaikan. Keterbukaan ini meliputi bidang politik, ekonomi dan pemerintahan (perumusan kebijakan, pengangkatan dalam jabatan).

4. Aturan hukum (*rule of law*)

Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat, fihak ketiga dilakukan berdasar hukum (peraturan yang sah), adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan public yang ditempuh.

5. Jaminan perlakuan yang adil/perlakuan kesetaraan (*fairness, a level playing field*)

Menurut Plumptre T (1981) dalam artikelnya "*Perspective Accountability in The Public Sector*" sebagaimana dikutip oleh LAN dalam Akuntabilitas dan Good Governance (2000:35), memberikan beberapa tuntutan untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. *Exemplary Leadership*

Pemimpin yang sensitip, *responsive* dan *accountable* akan transparan terhadap bawahannya maupun masyarakat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut ia memerlukan akuntabilitas.

b. *Public Debate*

Sebelum kebijakan yang besar disahkan seharusnya diadakan publik

debate terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

c. *Coordination*

Koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik tumbuh kembangnya akuntabilitas.

d. *Autonomy*

Instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien, dan paling efektif bagi pencapaian tujuan.

e. *Explicitness and clarity*

Standar evaluasi kinerja harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan.

f. *Legitimacy and acceptance*

Tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya diterima oleh semua fihak.

g. *Negotiation*

Harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggungjawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah.

h. *Educational comping and publicity*

Perlu dibuatkan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga diperoleh ekspektasi dan tanggapan mereka mengenai hal tersebut.

i. *Feedback and evaluation*

Agar akuntabilitas dapat terus menerus ditingkatkan dan disempurnakan maka perlu diperoleh informasi untuk mendapatkan umpan

balik dari para pembaca/penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi perbaikan.

j. Adaption and recycling

Perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Oleh karena itu system akuntabilitas harus terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan tipe *eksplanatif*. **Eksplanatif karena menerangkan hubungan atau relasi kausal antar fenomena : etika birokrasi sebagai faktor penentu keberhasilan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik** dapat dicapai tanpa merugikan salah satu pihak. Dan penulis menggunakan teknik analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara tentang Etika Birokrasi sebenarnya kita berbicara tentang nilai-nilai yang mendasari tindakan Birokrasi atau alat-alat Negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Secara akademis etika birokrasi termasuk etika sosial bersama dengan etika-etika yang lain seperti etika profesi, etika politik, etika lingkungan hidup, kritik ideologi, dan sikap terhadap sesama. Penerapan etika administrasi dalam prakteknya terutama dalam administrasi pemerintahan juga memiliki banyak aspek-aspek yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sejalan dengan

asas-asas Birokrasi untuk mencapai Pemerintahan yang baik, dengan mewujudkan prinsip demokratis, keadilan social dan pemerataan serta mewujudkan kesejahteraan umum.

Penerapan Konsep Etika Administrasi dalam Pejabat Pemegang Birokrasi

Tugas dari suatu Birokrasi salah satunya harus sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, tugas Pegawai Negeri, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata, menyelenggarakan tugas negara, menyelenggarakan tugas pemerintahan, dan menyelenggarakan tugas pembangunan. Dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa pegawai negeri harus bebas dari pengaruh golongan dan partai politik.

Etika Birokrasi telah termuat dalam peraturan Kepegawaian yang mengatur para aparat Birokrasi (Pegawai negeri) itu sendiri, yang mana kita tahu bahwa Birokrasi merupakan sebuah organisasi penyelenggara pemerintahan yang terstruktur dari pusat sampai kedaerah dan memiliki jenjang atau tingkatan yang disebut hirarki. Jadi Etika Birokrasi sangat terkait dengan tingkah laku para aparat birokrasi itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Aparat Birokrasi secara kongkrit di negara kita yaitu Pegawai Negeri baik itu Sipil maupun Militer, yang secara Organisatoris dan hirarkis

melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai aturan yang telah ditentukan. Etika Birokrasi merupakan bagian dari aturan main dalam organisasi Birokrasi atau Pegawai Negeri yang secara structural telah diatur aturan mainnya, dimana kita kenal sebagai Kode Etik Pegawai Negeri, yang telah diatur lewat Undang-undang Kepegawaian. Kode Etik yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebut Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (Sapta Prasetya KORPRI) dan dikalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebut Sapta Marga. Menanamkan Kode Etik tersebut adalah demi terciptanya Aparat Birokrasi lebih jujur, lebih bertanggung jawab, lebih berdisiplin, dan lebih rajin serta yang terpenting lebih memiliki moral yang baik terhindar dari perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain. Agar tercipta Aparat Birokrasi yang lebih beretika sesuai harapan di atas, maka perlu usaha dan latihan ke arah itu serta penegakkan sanksi yang tegas dan jelas kepada mereka yang melanggar kode Etik atau aturan yang telah ditetapkan.

Perilaku birokrasi terbentuk dari interaksi antara dua variabel, yaitu karakteristik birokrasi dan karakteristik manusia, atau lebih spesifik lagi, struktur dan aktor. Antara karakteristik itu dengan perilaku terdapat hubungan yang sedikit banyak bersifat kausal. Misalnya pada variabel organisasi, hierarki menimbulkan sifat taat bawahan terhadap atasan. Pada variabel

manusia, kepentingan atau kebutuhan hidup menuntut imbalan yang memadai dari organisasi. Perilaku birokrasi jauh berbeda jika dipahami dalam hubungan pemerintahan. Hubungan birokratik tidak sama dengan hubungan pemerintahan. Ketika Birokrasi Pemerintahan bertindak keluar, terjadilah hubungan birokratik pemerintahan, tetapi hubungan ini tidak identik dan tidak analog dengan hubungan birokratik. Dalam banyak hal, yang diperintah dan manusia bukanlah bawahan pemerintah. Bahkan pada saat rakyat berfungsi sebagai pemegang kedaulatan, pemerintah berada di bawahnya. Jika dilihat kondisi Indonesia pada saat ini, melalui fakta-fakta yang ada, saat ini masih banyak instansi-instansi pemerintah yang belum mampu menerapkan prinsip etika administrasi yang baik, sekali lagi hal ini tertumpu pada kemauan individu-individu yang berkerja dalam instansi tersebut untuk dapat merubah kebiasaan yang buruk dan mengantinya dengan penerapan etika administrasi yang baik.

Asas-asas Birokrasi dalam *Good Governance*

Terkait dengan Asas-asas Birokrasi dalam *Good Governance* atau Pemerintah yang baik memiliki pengertian yang berbeda-beda di setiap negara, yang artinya bahwa prinsip-prinsip ini tidak bersifat global. Di negara Indonesia, sebagian besar rakyat Indonesia sepakat bahwa pada era pemerintahan Soekarno berhasil meletakkan dasar Nasionalisme bagi bangsa Indonesia tetapi gagal dalam

merumuskan program-program pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Pada masa orde baru rakyat mengalami kemakmuran dengan dilaksanakannya pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional, tetapi dalam kenyataannya bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi belum dirasakan merata oleh masyarakat dan stabilitas telah memasing demokrasi/partisipasi rakyat, banyak pelanggaran hak asasi manusia dan menutup akses keterbukaan. Namun terlepas dari pendapat diatas, asas-asas pemerintahan yang baik. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik menurut Wahyudi Kumorotomo dalam buku "Etika Administrasi Negara" adalah:

i. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi ini sama seperti berdasar kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara, rakyat pula yang menentukan jalannya suatu negara dan pemerintahan. Di dalam sistem pemerintahan yang berdasar kedaulatan rakyat, maka kepentingan rakyatlah yang diutamakan karena kepentingan rakyat. Dasar dari konsep demokrasi menyangkut penilaian tentang nilai manusia, martabat manusia, dan kesamaan di hadapan hukum. Demokrasi mendambakan terciptanya suatu sistem kemasyarakatan yang setiap warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama dan adil. Oleh karena itu dalam pemerintahan dengan prinsip demokrasi, hendaknya setiap

aktivitas birokrasi pemerintahan dalam mewujudkan kepentingan rakyat berjiwa demokrasi, dapat dipertanggungjawabkan, dan efisien.

ii. Keadilan sosial dan pemerataan

Keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan tercapai apabila tidak terjadi ketimpangan distribusi hasil-hasil pembangunan antarkelompok masyarakat kaya dengan miskin dan antardaerah/wilayah geografis antara perkotaan dengan pedesaan. Oleh karena itu aparat birokrasi agar membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menyeimbangkan kebutuhan masyarakat miskin dan masyarakat pedesaan dengan kebutuhan masyarakat kaya dan masyarakat perkotaan.

iii. Mengusahakan kesejahteraan umum

Setiap aparat birokrasi pemerintah agar mempunyai komitmen yang tulus untuk memperhatikan kesejahteraan kepada rakyat.

iv. Mewujudkan negara hukum

Indonesia pada dasarnya merupakan negara hukum. Maksud dari perwujudan negara hukum adalah aparatur pemerintah bersama dengan seluruh rakyat akan mewujudkan suatu pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

v. Dinamika dan efisiensi

Dinamika hendaknya diartikan sebagai kemampuan beradaptasi dengan globalisasi suatu organisasi. Maksud dari globalisasi ini adalah adaptasi

organisasi yang baik sehingga ia sanggup mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan dapat menelorkan kebijakan-kebijakan yang tepat. Dinamika dalam melaksanakan tugas-tugas negara merupakan prasyarat untuk dapat menciptakan birokrasi pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang. Di samping itu efisiensi sama diperlukan. Efisiensi dalam hal ini diartikan adalah tetap mengutamakan kepuasan dan kelancaran layanan terhadap publik, tetapi tetap memperhitungkan pemakaian tenaga kerja, prosedur layanan, dan biaya yang dikeluarkan.

Selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik tercantum juga dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum,

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

3. Asas Kepentingan Umum,

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas Keterbukaan,

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas,

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

6. Asas Profesionalitas,

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas,

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tambahan dua asas yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketujuh asas diatas ditambah lagi dengan 2 asas yaitu Asas Efektivitas dan Asas Efisiensi.

Implementasi Etika dalam Birokrasi

Ada beberapa alasan mengapa Etika Birokrasi penting diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap dan akuntabel, salah satunya adalah karena masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah dimasa mendatang akan semakin kompleks. Dalam memecahkan masalah yang

berkembang, birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan-pilihan yang jelas seperti baik dan buruk. Para pejabat birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara baik dan baik, yang masing-masing memiliki implikasi yang saling berbenturan satu sama lain. Pengembangan etika birokrasi mungkin bisa fungsional terutama dalam memberi “policy guidance” kepada para pejabat birokrat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Alasan lainnya adalah keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan tentunya menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan adjustments agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemampuan untuk bisa melakukan penyesuaian itu menuntut *discretionary power* yang besar. Penggunaan kekuasaan direksi ini hanya akan dapat dilakukan dengan baik kalau birokrasi memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai besarnya kekuasaan yang dimiliki dan implikasi dari penggunaan kekuasaan itu bagi kepentingan masyarakatnya.

Dari alasan-alasan yang sudah diuraikan, sudah jelas bahwa etika Birokrasi sangat dibutuhkan pada saat ini mengingat di Negara kita masyarakat bergantung pula pada Birokrasi tersebut. Para Birokrat juga membutuhkan perubahan sikap perilaku

agar dapat dikatakan lebih beretika di dalam melaksanakan tugasnya. Namun dengan alasan perekonomian Pegawai negeri yang minim, atau lebih tepatnya pengawasan yang tidak ketat didalam suatu birokrasi menjadi salah satu penyebab penyimpangan etika. Salah satunya seperti bentuk korupsi, kolusi, maupun nepotisme atau yang sering kita sebut dengan KKN. Ketiganya merupakan tindakan yang menyimpang hukum dan biasanya pada kasus-kasus ini terdapat banyak penyimpangan serta penyelewengan pada *law enforcement*, hal ini sangat besar kemungkinan pada etika administrasi negara dalam revitalisasi manajemen pemerintahan dalam rangka upaya penataan ulang pemerintahan Indonesia yang tidak sesuai dengan *good governance*. Pada kenyataannya *Law enforcement* dalam manajemen pemerintahan di Indonesia sangat diabaikan sehingga akan sangat menjadi ancaman bagi manajemen pemerintahan dalam upaya menata ulang manajemen pemerintahan yang sehat dan dapat meminimalisir terjadinya birokratologi dan mal administrasi. Yang mana sebetulnya semua penyelewengan akan mudah diminimalisir, jika prinsip *good governance* ini dipegang oleh masing-masing birokrasi yang ada.

Korupsi: Salah Satu Bentuk Kegagalan Etika

Korupsi dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan menggunakan barang publik, bisa berupa uang dan jasa, untuk kepentingan memperkaya diri, dan bukan untuk kepentingan publik. Dilihat

proses terjadinya perilaku korupsi ini dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu *Graft*, *Bribery*, dan *nepotism*.

Graft, merupakan korupsi yang bersifat *internal*. Artinya korupsi yang dilakukan tanpa melihat pihak ketiga. Seperti menggunakan atau atau mengambil barang kantor, uang kantor, jabatan kantor untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi ini terjadi karena mereka mempunyai kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan wewenangnya, para bawahan tidak dapat menolak permintaan atasannya. Menolak atau mencegah permintaan atasannya dianggap sebagai tindakan yang tidak loyal terhadap atasan. Bahkan sering terjadi, sebelum atasan minta, bawahan sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh atasan. Misalnya ada seorang pejabat (di daerah) punya hajat mantu, maka segala sesuatu yang diperlukan untuk hajat tersebut telah dicukupi oleh anak buahnya, dan panitia yang dibentuk pun sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing anak buahnya. Pejabat tersebut sudah tahu “beres” segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingan hajat mantu tersebut. Contoh di atas, merupakan wujud dari tindakan korupsi berupa “*grafri*”.

Sementara *bribery* (penyogokan, penyuapan), merupakan tindakan korupsi yang melibatkan orang lain diluar dirinya (instansinya). Karenanya korupsi ini sering disebut dengan korupsi yang bersifat *eksternal*. Artinya tindakan korupsi tadi tidak akan terjadi jika tidak ada orang lain, yang

melakukan tindakan penyuapan, penyogokan terhadap dirinya. Tindakan pemberian sesuatu (penyogokan, penyuapan, pelicin), dimaksudkan agar dapat memengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan, atau keputusan yang dibuat akan menguntungkan pemberi, penyuap, atau penyogok. Pemberian sesuatu (penyogok, penyuap, pelicin) dapat berupa uang, materi, tapi bisa juga berupa jasa. Korupsi semacam ini sering terjadi pada dinas/instansi yang mempunyai tugas pelayanan, menerbitkan surat izin, rekomendasi, dan lain sebagainya. Pelayanan yang diberikan seringkali dihambat, tidak lancar, bukan karena sistem dan prosedurnya, tapi karena disengaja oleh oknum birokrat. Sehingga mereka yang berkepentingan, lebih suka melalui calo, atau dengan cara memberi pelicin berupa uang untuk menyuap, menyogok, agar urusannya menjadi lancar.

Sedangkan *nepotism*, merupakan suatu tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan pada pertimbangan objektif, rasional, tapi didasarkan atas pertimbangan “nepitis”, “kekerabatan”, seperti masih teman, keluarga, golongan, pejabat, dan lain sebagainya. Pertimbangan pengambilan keputusan tadi, sering kali untuk kepentingan orang yang membuat keputusan. Mereka akan lebih aman, orang yang berada disekitarnya (anak buahnya) adalah orang-orang yang masih nepotis atau masih kerabat dekat. Jika mereka melakukan tindakan

penyimpangan mereka akan aman dan dilindungi.

Korupsi di atas adalah korupsi yang dilihat dari proses terjadinya. Namun dilihatnya dari sifatnya korupsi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu korupsi individualis dan korupsi sistemik.

Korupsi individualis, merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang dalam suatu organisasi dan berkembang suatu mekanisme muncul, hilang dan jika ketahuan pelaku korupsi akan terkena hukuman, bisa berupa dijauhi, dicela, disudutkan, dan bahkan diakhiri nasib kariernya. Perilaku korup ini dianggap oleh kelompok (masyarakat) sebagai tindakan yang menyimpang, buruk, dan tercela.

Korupsi sistemik, berbeda dengan korupsi individualisme. Korupsi sistemik merupakan suatu korupsi ketika yang melakukan korupsi adalah sebagian besar (kebanyakan orang) dalam suatu organisasi (melibatkan banyak orang). Dikatakan sistemik, karena tindakan korupsi ini bisa diterima sebagai sesuatu yang wajar/biasa (tidak menyimpang) oleh orang yang berada di sekitarnya dan merupakan bagian dari suatu realita. Jika ketahuan, maka diantara mereka yang terlibat saling melindungi, menutup-nutupi, dan mendukung satu sama lain untuk menyelamatkan orang yang ketahuan tadi. Hal ini disebabkan diantara mereka tidak ingin instansinya tercemar, sehingga walaupun mereka tahu ada tindakan korupsi mereka lebih

baik “diam”, daripada mereka akan dikucilkan, dan menjadi saksi dalam perkara atas tindakan korupsi tadi.

Upaya yang Dapat Ditempuh dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

- a. Upaya pencegahan (preventif).
 - b. Upaya penindakan (kuratif).
 - c. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.
 - d. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
1. Upaya Pencegahan (Preventif)
- a. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
 - b. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
 - c. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
 - d. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
 - e. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
 - f. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.
 - g. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
 - h. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.

2. Upaya Penindakan (Kuratif)

Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK :

- a. Kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya (persero) bahkan disebut sebagai kerugian besar bagi Negara oleh BPK yang mencapai hingga belasan triliun rupiah (2020).
- b. Kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari adalah tersangka dalam kasus penyuaipan uang 500.000 dolar AS, sekitar Rp. 7,3 miliar dari buronan Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra (2020).
- c. Kasus dugaan suap ekspor benih lobster Menteri KKP Edhy Prabowo yang menduga menerima suap dengan total Rp.10,2 miliar dari Suharjito (2020).
- d. Kasus suap Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dilaporkan terkait dugaan suap perizinan rumah sakit, diduga menerima sejumlah uang beberapa kali dari HY yang merupakan komisaris RS umum kasih bunda (2020).
- e. Kasus dugaan suap Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan social Covid-19. KPK menduga Juliari menerima uang Rp. 8,2 miliar (2020).
- f. Kasus Pelindo II korupsi proyek pengadaan tiga Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II menyeret nama mantan Dirut PT

Pelindo RJ Lino, berdasarkan laporan keuangan BPK menyebabkan kerugian Negara hingga Rp.6 triliun (2021).

- g. Kasus Bank Century Negara mengalami kerugian sebesar Rp.7 triliun atas pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century. Kasus ini turut menyeret beberapa nama besar, namun baru Budi Mulya yang sudah divonis 15 tahun penjara (2021).
- h. Kasus Asabri, BPK mengumumkan kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi di PT Asabri mencapai 22,78 triliun. Kerugian Negara itu timbul akibat adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana investasi PT Asabri selama periode 2012-2019.

Upaya Edukasi

Masyarakat/Mahasiswa

- a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.
- b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
- c. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.
- d. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
- e. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

4. Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

- a. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tgl 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca-Soeharto yg bebas korupsi.
- b. Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, disusul Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005, Indonesia berada di posisi keenam negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti &

Myanmar. Sedangkan Islandia adalah negara terbebas dari korupsi.

KESIMPULAN

Penerapan etika administrasi dalam prakteknya terutama dalam administrasi pemerintahan memiliki banyak aspek-aspek yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, seperti menjalankan asas-asas birokrasi pemerintahan yang baik, dengan mewujudkan prinsip demokratis, keadilan social dan pemerataan serta mewujudkan kesejahteraan umum. Selain itu dalam upaya penerapan etika administrasi pemerintahan yang baik, perlu adanya aturan-aturan yang dibuat untuk mengatur para birokrat untuk tetap konsisten menjalankan dan mengamalkan etika yang baik dalam administrasi pemerintah.

Jika dilihat kondisi Indonesia pada saat ini, melalui fakta-fakta yang ada, saat ini masih banyak instansi-instansi pemerintah yang belum mampu menerapkan prinsip etika administrasi yang baik, sekali lagi hal ini tertumpu pada kemauan individu-individu yang berkerja dalam instansi tersebut untuk dapat merubah kebiasaan yang buruk dan mengantinya dengan penerapan etika administrasi yang baik.

Asas-asas Birokrasi dalam *Good Governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Nomor 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum,
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,

3. Asas Kepentingan Umum,
4. Asas Keterbukaan,
5. Asas Proporsionalitas,
6. Asas Profesionalitas,
7. Asas Akuntabilitas,

Adapun tambahan dua asas yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketujuh asas diatas ditambah lagi dengan 2 asas yaitu Asas Efektivitas dan Asas Efisiensi.

Mal-administrasi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari nilai etika. Secara “psiko-sosiologis”, suatu tindakan yang menyimpang dari nilai adalah disebabkan karena bertemunya faktor “niat atau kemauan” dan “kesempatan”. Jika ada niat untuk melakukan tindakan mal-administrasi, sementara kesempatan tidak ada, maka tindakan mal-administrasi tadi tidak akan terjadi. Sebaliknya, ada kesempatan untuk melakukan korupsi, namun pada dirinya tidak ada niat atau kemauan untuk melakukan mal administrasi, maka tindakan mal administrasi juga tidak akan terjadi.

Tidak sedikit pejabat lokal (birokrasi lokal) yang kurang memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Akibatnya birokrasi publik pada era reformasi banyak disorot publik. Sorotan itu lebih banyak tertuju pada praktek yang menyimpang (mal-administration) dari etika administrasi negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bentuk mal-administrasi dapat berupa korupsi, kolusi, nepotisme, tidak efisien, dan

tidak profesional. Bentuk mal-administrasi pada umumnya lebih berkaitan dengan perilaku individu yang menduduki suatu jabatan hierarkhi, terutama pada tingkat bawah.

DAFTAR PUSTAKA

file:///C:/Users/USER/Downloads/Dera+Izhar+Hasanah.pdf

H. De Vos. (1987). *Pengantar Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

<http://eprints.ipdn.ac.id/42/13/ebook%20BUKU%20ETIKA%20PEMERINTAHAN.pdf>

<http://hombang.blogspot.com/2010/06/etika-birokrasi.html> diunduh tanggal 11 Mei 2011

<http://kumpulanmakalahadministrasinegara.blogspot.com/2011/01/etika-administrasi-alam-praktek.html> diunduh tanggal 07 Mei 2011

<http://puskan.lan.go.id/files/Modul%2011%20Etika%20Publik.pdf>

<http://repository.untag-sby.ac.id/931/2/BAB%20I.pdf>

http://www.transparansi.or.id/agenda/agenda2/seri_dialog/dialog7.html diunduh tanggal 11 Mei 2011

<https://media.neliti.com/media/publications/261302-analisa-perbandingan-model-birokrasi-ind-9f6e8d18.pdf>

- <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-1--reformasi-birokrasi-reformasi-pelayanan-publik>
- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35496/inilah-capaian-reformasi-birokrasi-semester-pertama-2021/0/berita>
- <https://www.kompas.tv/article/204569/deretan-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-negara-rugi-puluhan-triliun>
- <https://www.pacilegon.go.id/artikel/248-dinamika-birokrasi-indonesia-dan-sistem-pengawasan-untuk-mewujudkan-good-governance>
- <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011148547/5-kasus-korupsi-yang-mencuri-perhatian-sepanjang-2020-mulai-jaksa-pinangki-hingga-mensos-juliari?page=5>
- <https://yoursay.suara.com/news/2020/03/24/172139/birokrasi-modern-indonesia-melayani-atau-mengkorupsi>
- Jeck H. Kontt & G.J. Miller, *Reformasi birokrasi dan Pilihan institusi politik*. Hlm : 173-175
- K. Frankena, William. (1982). *Ethics*. New Delhi: Prentice-Hall.
- Kumorotomo, Wahyudi, (2001). *Etika Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Robert C., Solomon. (1987). *Etika: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Sadhana Kridawati, (2010). *Etika Birokrasi Dlam Pelayanan Publik*, Citra Malang, Malang.
- Sukirman & Endah Apriani, (2002). *Potret Kepuasan Konsumen Pelayanan Publik Kota Bandung*,
- Taufik Abdulah, *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi, 1988*. Hlm 3
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.